

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Strategi pada dasarnya adalah upaya-upaya sistematis dari analisis yang rasional bagaimana sasaran strategik dicapai dengan efektif dan efisien. Strategi menjabarkan langkah-langkah mencapai visi dan misi melalui program prioritas yang sesuai dengan kebijakan umum. Untuk mendapatkan gambaran nyata bagaimana langkah-langkah strategik dilakukan dari waktu ke waktu, arah kebijakan membedah kapan indikator capaian masing-masing sasaran harus dicapai. Sekaligus, memandu pada rentang waktu mana strategi harus dijalankan dalam kurun 2011-2016 tersebut.

A. Arah Kebijakan

Arah kebijakan memberikan pedoman bagaimana strategi terhubung ke sasaran dan kapan sasaran tersebut harus tercapai. Arah kebijakan diwujudkan dengan fokus atau prioritas capaian dari waktu ke waktu. Program yang disusun nantinya adalah merupakan penjabaran lebih lanjut dari misi, tujuan dan sasaran dimulai dari tahun pertama dimulainya periode RPJMD. Dalam hal ini, beberapa program tetap diteruskan sampai dengan tahun 2016 namun ada juga program yang hanya dilaksanakan dalam satu atau dua tahun. Lingkup arah kebijakan akan mengarah pada tiga aspek, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

Sesuai dengan perodesasi RPJMD yakni tahun 2011-2016, namun dalam penyajian arah kebijakannya dimulai pada tahun 2012, mengingat pada tahun 2011 program yang ada sudah dilaksanakan. Berdasarkan analisis potensi daerah yang di antaranya telah tertuang dalam RTRWP Kabupaten Barito Selatan dan gambaran umum, isu-isu strategis yang ada, termasuk juga dokumen-dokumen perencanaan yang ada serta memperhatikan ketersediaan pendanaan pembangunan maka fokus dan prioritas masing-masing tahun adalah sebagai berikut:

1. Arah kebijakan pembangunan tahun 2012

Seperti diuraikan di atas, semua program pada dasarnya adalah merupakan kesinambungan dari program-program sebelumnya, sehingga pelaksanaannya dimulai dari tahun pertama yakni tahun 2011. Namun karena fokus pembangunan daerah 2011-2016 disesuaikan dengan misi yang ada maka untuk mendapatkan hasil pembangunan yang optimal perlu dilakukan beberapa penataan antara lain pembuatan dan penyempurnaan regulasi,

pembuatan dan penyempurnaan berbagai dokumen perencanaan sebelum pelaksanaannya dimulai.

Beberapa fokus prioritas yang harus dilaksanakan pada tahap ini, meliputi:

- 1) Pengembangan infrastruktur dasar dan jaringan transportasi, komunikasi, pengairan, kelistrikan, taman kota, dan implementasi pemanfaatan tata ruang
- 2) Pengembangan sarana dan prasarana bagi tenaga pendidik dan kependidikan
- 3) Peningkatan kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.
- 4) Penyusunan dan penyempurnaan regulasi dan penyelenggaraan sistem pendidikan dan kesehatan.
- 5) Penyediaan sarana-prasarana dan infrastruktur pendidikan dan kesehatan
- 6) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan
- 7) Pengembangan ekonomi kerakyatan
- 8) Peningkatan inovasi dan produktivitas ekonomi kerakyatan
- 9) Pengembangan pusat-pusat ekonomi unggulan daerah
- 10) Pengembangan kapasitas dan kinerja aparatur
- 11) Stabilitas kehidupan sosial politik masyarakat
- 12) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan masyarakat
- 13) Revitalisasi pengelolaan hutan

2. Arah kebijakan pembangunan tahun 2013

Arah kebijakan pada tahun 2013 merupakan kesinambungan dari tahun-tahun 2011 dan 2012, berdasarkan dokumen perencanaan dan regulasi yang telah dibuat. Sarana dan prasarana menjadi salah satu fokus pada tahap ini. Melalui RTRW Kabupaten Barito Selatan yang didalamnya telah berisi pusat-pusat unggulan ekonomi daerah dan jabaran teknis dalam dokumen kajian lainnya pelaksanaan lebih lanjut dilakukan guna mengembangkan berbagai pusat ekonomi unggulan daerah. Koordinasi menjadi salah satu agenda utama untuk mencapai tujuan dimaksud. Begitu pula untuk perbaikan layanan bidang pendidikan dan kesehatan dan bidang lainnya.

- 1) Pengembangan infrastruktur dasar dan jaringan transportasi, komunikasi, pengairan, kelistrikan, taman kota, dan implementasi pemanfaatan tata ruang (lanjutan)
- 2) Pengembangan sarana dan prasarana bagi tenaga pendidik dan kependidikan (lanjutan)
- 3) Peningkatan kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan (lanjutan)
- 4) Penyusunan dan penyempurnaan regulasi dan penyelenggaraan sistem pendidikan dan kesehatan (lanjutan)
- 5) Penyediaan sarana-prasarana dan infrastruktur pendidikan dan kesehatan (lanjutan)
- 6) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan (lanjutan)

- 7) Pengembangan ekonomi kerakyatan (lanjutan)
- 8) Peningkatan inovasi dan produktivitas ekonomi kerakyatan (lanjutan)
- 9) Pengembangan pusat-pusat ekonomi unggulan daerah (lanjutan)
- 10) Pengembangan kapasitas dan kinerja aparatur
- 11) Stabilitas kehidupan sosial politik masyarakat
- 12) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan masyarakat (lanjutan)
- 13) Revitalisasi pengelolaan hutan (lanjutan)

3. Arah kebijakan pembangunan tahun 2014

Arah kebijakan pada tahap ini difokuskan pada keberlanjutan dari fokus tahun -tahun sebelumnya, berdasarkan dokumen perencanaan dan regulasi yang telah dibuat. Melalui RTRW Kabupaten Barito Selatan yang didalamnya telah berisi pusat-pusat unggulan ekonomi daerah dan jabaran teknis dalam dokumen kajian lainnya pelaksanaan lebih lanjut dilakukan guna mengembangkan berbagai pusat ekonomi unggulan daerah. Koordinasi menjadi salah satu agenda utama untuk mencapai tujuan dimaksud. Begitu pula untuk perbaikan layanan bidang pendidikan dan kesehatan. Sarana dan prasarana menjadi salah satu fokus pada tahap ini.

Secara lengkap, fokus prioritas tahap ini adalah:

- 1) Pengembangan infrastruktur dasar dan jaringan transportasi, komunikasi, pengairan, kelistrikan, taman kota, dan implementasi pemanfaatan tata ruang (lanjutan)
- 2) Pengembangan sarana dan prasarana bagi tenaga pendidik dan kependidikan (lanjutan)
- 3) Peningkatan kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan (lanjutan)
- 4) Penyusunan dan penyempurnaan regulasi dan penyelenggaraan sistem pendidikan dan kesehatan (lanjutan)
- 5) Penyediaan sarana-prasarana dan infrastruktur pendidikan dan kesehatan (lanjutan)
- 6) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan (lanjutan)
- 7) Pengembangan ekonomi kerakyatan (lanjutan)
- 8) Peningkatan inovasi dan produktivitas ekonomi kerakyatan (lanjutan)
- 9) Pengembangan pusat-pusat ekonomi unggulan daerah (lanjutan)
- 10) Pengembangan kapasitas dan kinerja aparatur
- 11) Stabilitas kehidupan sosial politik masyarakat
- 12) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan masyarakat (lanjutan)
- 13) Revitalisasi pengelolaan hutan (lanjutan)

3. Arah kebijakan pembangunan tahun 2015

Arah kebijakan pada tahap ini difokuskan pada kelanjutan upaya-upaya pemberdayaan

ekonomi kerakyatan melalui berbagai program peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan dukungan kelembagaan lainnya, disamping keberlanjutan dari upaya-upaya sebelumnya. Tahap ini juga mulai dilakukan secara khusus upaya-upaya memberdayakan budaya lokal dalam berbagai bentuk.

Tujuannya adalah agar tercipta soliditas struktur masyarakat yang berbeda golongan dengan tetap menjadikan budaya lokal sebagai basis penguatan dalam keberagaman. Kelanjutan perbaikan sistem layanan kesehatan dan pendidikan juga tetap dilakukan. Secara lengkap, fokus pada tahapan ini adalah:

- 1) Pengembangan infrastruktur dasar dan jaringan transportasi, komunikasi, pengairan, kelistrikan, taman kota, dan implementasi pemanfaatan tata ruang (lanjutan)
- 2) Pengembangan dan penataan fasilitas sarana dan prasarana kota Buntok menuju kota transit, perdagangan, dan pariwisata eko.
- 3) Pengembangan sarana dan prasarana bagi tenaga pendidik dan kependidikan (lanjutan)
- 4) Peningkatan kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan (lanjutan)
- 5) Penyusunan dan penyempurnaan regulasi dan penyelenggaraan sistem pendidikan dan kesehatan (lanjutan)
- 6) Penyiapan pendirian pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan tinggi
- 7) Penyediaan sarana-prasarana dan infrastruktur pendidikan dan kesehatan (lanjutan)
- 8) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan (lanjutan)
- 9) Pengembangan ekonomi kerakyatan (lanjutan)
- 10) Peningkatan inovasi dan produktivitas ekonomi kerakyatan (lanjutan)
- 11) Pengembangan pusat-pusat ekonomi unggulan daerah (lanjutan)
- 12) Pengembangan kapasitas dan kinerja aparatur
- 13) Stabilitas kehidupan sosial politik masyarakat
- 14) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan masyarakat (lanjutan)
- 15) Revitalisasi pengelolaan hutan (lanjutan)
- 16) Pengembangan budaya lokal

4. Arah kebijakan pembangunan tahun 2016

Arah kebijakan pada tahun 2016 ini merupakan tahapan akhir, namun masih tetap merupakan kelanjutan dan penuntasan bagi keseluruhan tahap pembangunan selama 5 (lima) tahun. Arah kebijakan ini harus dipandang sebagai kebijakan akhir dengan tetap melihat keberhasilan tahap-tahap sebelumnya. Dengan asumsi bahwa tahap-tahap sebelumnya telah berhasil dilakukan, maka pemberdayaan ekonomi kerakyatan berujung pada pengembangan daya saing ke segi orientasi ekspor untuk komoditas unggulan tertentu. Upaya yang dilakukan antara lain adalah fasilitasi pemasaran, insentif ekspor, dan berbagai

kemudahan birokrasi lainnya. Tahap ini juga mengakhiri tahapan-tahapan dalam perbaikan sistem layanan pendidikan dan upaya penguatan struktur dan kultur masyarakat yang kondusif bagi agenda pembangunan. Secara lengkap, fokus pada tahap ini adalah:

- 1) Pengembangan infrastruktur dasar dan jaringan transportasi, komunikasi, pengairan, kelistrikan, taman kota, dan implementasi pemanfaatan tata ruang (lanjutan)
- 2) Pengembangan fasilitas sarana dan prasarana kota Buntok menuju kota transit, perdagangan, dan pariwisata eko (lanjutan)
- 3) Pengembangan sarana dan prasarana bagi tenaga pendidik dan kependidikan (lanjutan)
- 4) Peningkatan kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan (lanjutan)
- 5) Pengembangan pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan tinggi (lanjutan)
- 6) Penyediaan sarana-prasarana dan infrastruktur pendidikan dan kesehatan (lanjutan)
- 7) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan (lanjutan)
- 8) Pengembangan ekonomi kerakyatan (lanjutan)
- 9) Peningkatan inovasi dan produktivitas ekonomi kerakyatan (lanjutan)
- 10) Pengembangan pusat-pusat ekonomi unggulan daerah (lanjutan)
- 11) Pengembangan kapasitas dan kinerja aparatur
- 12) Stabilitas kehidupan sosial politik masyarakat
- 13) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan masyarakat (lanjutan)
- 14) Revitalisasi pengelolaan hutan (lanjutan)
- 15) Pengembangan daya saing dan orientasi ekspor komoditas lokal
- 16) Pengembangan kehidupan masyarakat yang rukun, damai, dan sejahtera

B. Strategi

Memperhatikan RPJM Nasional 2009-2014 yang berkeinginan mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan dan RPJPD dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2010-2015 yang ingin mewujudkan Kalimantan Tengah yang lebih sejahtera dan bermartabat, serta arah pembangunan RPJPD Kabupaten Barito Selatan maka arah dan agenda pembangunan kabupaten juga mengandung muatan atas pentingnya pembangunan sumberdaya manusia, pembangunan ekonomi, pembangunan wilayah, pembangunan sosial-budaya, dan pembangunan pemerintahan.

Berkenaan dengan pembangunan daerah, telah digariskan bahwa apa yang menjadi visi-misi daerah harus selaras dengan visi-misi pembangunan nasional. Dalam pada itu, pandangan pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah bahwa visi dari pembangunan daerah adalah terwujudnya kapasitas daerah yang maju dengan masyarakat yang mandiri. Sedangkan misi pembangunan daerah adalah: (1) memantapkan otonomi daerah dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan; (2) mempercepat pengembangan wilayah

dengan mengutamakan peningkatan daya saing sebagai dasar pertumbuhan daerah; (3) pemerataan antardaerah; (4) pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan; (5) meningkatkan kapasitas masyarakat dengan memberikan hak kepada masyarakat untuk pengembangan diri; serta (6) mempercepat penyelesaian masalah sosial, ekonomi, politik serta hukum di beberapa daerah.

Memperhatikan berbagai uraian tersebut di atas, Kabupaten Barito Selatan secara umum memiliki kesamaan dengan arah pembangunan daerah yang digariskan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, dan bila dijabarkan lebih rinci sesuai karakteristik daerah akan ditekankan pada aspek-aspek: (1) peningkatan kualitas SDM sehingga bisa menjadi aset utama keunggulan kompetitif kabupaten; (2) pembangunan dan pengembangan infrastruktur untuk menjangkau daerah-daerah yang masih terisolir; (3) pengembangan pertanian dalam arti luas sehingga dapat menghasilkan produk unggulan yang mampu bersaing di pasar nasional; (4) perbaikan lingkungan hidup; dan (5) penanganan kemiskinan dengan prioritas pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Kelima prioritas pembangunan tersebut dipadukan dalam kerangka vitalisasi dan aktualisasi melalui pelaksanaan strategi, seperti peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan publik yang sulit terlaksana tanpa diimbangi oleh peningkatan kualitas SDM.

Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* pembangunan daerah. Disini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*).

Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Strategi pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 - 2016, adalah sebagai berikut:

1. Strategi ke-1 (Kesatu): Peningkatan infrastruktur kota Buntok, kecamatan dan desa.

Strategi kesatu merupakan upaya untuk mendukung pelaksanaan Misi 1, yaitu “Membangun dan Meningkatkan Infrastruktur untuk membuka isolasi daerah melalui pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan jembatan, dermaga, dan pelabuhan udara, sehingga memiliki keterkaitan antara daerah satu dengan yang lain.

Strategi peningkatan infrastruktur ini adalah berkaitan dengan pembangunan sistem infrastruktur antarkawasan dan keterhubungan dari kota Buntok dengan daerah kecamatan dan desa serta wilayahnya lainnya mengingat sebagian besar wilayah yang

didominasi oleh kawasan rawa (81%) dari luas wilayah Barito Selatan. Termasuk dalam strategi ini adalah program pengembangan infrastruktur yang menjangkau kantong-kantong pemukiman, baik di pedalaman maupun di sepanjang aliran sungai dilanjutkan dengan pengembangan infrastruktur ke pusat-pusat ekonomi rakyat.

Posisi kota Buntok sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) mengharuskan memiliki sarana prasarana yang memadai yang berfungsi melayani kegiatan skala provinsi, beberapa kabupaten/kota hingga kegiatan skala kecamatan yang meliputi sistem pusat pelayanan, jaringan prasarana transportasi, jaringan prasarana telekomunikasi, jaringan prasarana sumberdaya air, dan jaringan prasarana lingkungan.

Adapun tujuan yang ingin diraih melalui strategi ini adalah:

- a. Terwujudnya infrastruktur daerah sehingga terciptanya sinergitas yang hierarkis untuk mewujudkan hasil dan pemerataan pembangunan
- b. Tersedianya infrastruktur pengairan yang mendukung ketahanan pangan.

Sasaran yang ingin dicapai dari strategi ini adalah :

- 1) Terwujudnya penataan kota Buntok dan kota kecamatan sebagai sebuah sistem pusat pelayanan yang tersinergi
- 2) Terwujudnya pembangunan jaringan jalan provinsi, kabupaten, dan jalan loka l serta jembatan.
- 3) Terwujudnya pengembangan terminal darat dan pengembangan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, pembangunan dermaga induk.
- 4) Terwujudnya peningkatan jaringan listrik, taman kota yang mendukung kelestarian lingkungan.
- 5) Terpeliharanya dan terbangunnya infrastruktur pengairan makro dan mikro, serta pencetakan sawah.

2. Strategi ke-2 (Kedua) : Pengembangan infrastruktur pengairan dan pengembangan energi kelistrikan

Strategi kedua merupakan upaya untuk mendukung pelaksanaan Misi 1, yaitu Membangun dan Meningkatkan Infrastruktur untuk membuka isolasi daerah melalui pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan jembatan, dermaga, dan pelabuhan udara, sehingga memiliki keterkaitan antara daerah satu dengan yang lain.

Prasarana pertanian yang saat ini keberadaannya sangat memprihatinkan adalah jaringan irigasi. Kurangnya jaringan irigasi yang baru serta rusaknya jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian sangat menurun. Kerusakan ini terutama diakibatkan banjir dan erosi, kerusakan sumberdaya alam di daerah aliran sungai, bencana alam serta kurangnya pemeliharaan jaringan irigasi hingga ke tingkat usahatani.

Prasarana usaha tani lain yang sangat dibutuhkan masyarakat dan pedagang

komoditas pertanian namun keberadaannya masih terbatas adalah jalan usahatani dan jalan produksi.

Adapun tujuan yang ingin diraih melalui strategi ini adalah:

a. Tersedianya infrastruktur pengairan yang mendukung ketahanan pangan.

Sasaran yang ingin dicapai dari strategi ini adalah :

a. Terwujudnya peningkatan jaringan listrik, taman kota yang mendukung kelestarian lingkungan.

b. Terpeliharanya dan terbangunnya infrastruktur pengairan makro dan mikro, serta pencetakan sawah.

3. Strategi ke-3 (Ketiga) Perbaikan Sistem dan Akses Pendidikan

Strategi ketiga merupakan upaya untuk mendukung pelaksanaan Misi 2, yaitu

“Mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merta serta terakses.”

Kepastian penduduk usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan dasar yang bermutu dan merata masih merupakan perm masalah penting yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan.

Suatu perbaikan sistem memerlukan perencanaan yang holistik terhadap seluruh pelaku sistem, baik aspek manajemen (organisasi, prosedur, dan pengendalian), aparatur (tenaga pendidik dan kependidikan), sarana dan prasarana, faktor penunjang lain bagi peserta didik, dan infrastruktur pendidikan, dan komponen lainnya. Suatu perbaikan sistem diharapkan dapat mengefisiensikan biaya dan mengefektifkan tujuan sistem pendidikan antara lain menghasilkan siswa yang bermutu dan sesuai kriteria. Sementara itu, sistem pendidikan yang telah diperbaiki, khususnya (diprioritaskan) pendidikan dasar, ditindaklanjuti dengan agenda pembangunan untuk memenuhi syarat aksesibilitas; baik secara geografis maupun teraksesnya pendidikan dasar oleh masyarakat ekonomi lemah.

Tujuan yang ingin diraih melalui strategi kedua ini adalah: (a) terselenggaranya sistem pendidikan yang bermutu dan terjangkau, dan (b) tersedianya infrastruktur pendidikan hingga ke pelosok wilayah.

Sasaran yang ingin dicapai dari strategi ini adalah:

- 1) Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- 2) Pnaatan sistem pendidikan yang efektif dan efisien;
- 3) Tersedianya sarana dan prasarana bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- 4) Tersedianya akses infrastruktur menuju pusat-pusat pendidikan

4. Strategi ke-4 (Keempat) : Perbaikan Sistem dan Akses Kesehatan

Strategi keempat merupakan upaya untuk mendukung pelaksanaan Misi 3, yaitu

“Menjamin kesehatan masyarakat yang merata dan mudah dijangkau”.

Target urusan kesehatan di masa lalu masih perlu peningkatan antara lain juga untuk memenuhi target MDGs (bidang kesehatan) dan Indonesia Sehat yang belum tercapai dimasa lalu. Langkah mendasar strategi ini adalah perbaikan regulasi sistem kesehatan. Selanjutnya penyelenggaraan sistem kesehatan diarahkan pada pengembangan berbagai komponen sistem, antara lain peningkatan kapasitas kinerja tenaga kesehatan hingga perbaikan infrastruktur kesehatan untuk mewujudkan penjaminan kesehatan masyarakat secara merata.

Salah satu pijakan utama strategi ini adalah permasalahan rendahnya jumlah tenaga kesehatan yang tidak hanya di Barito Selatan namun juga dihadapi kabupaten lainnya di Kalimantan Tengah. Untuk itu, upaya-upaya peningkatan kuantitas (dan sekaligus, kualitas) mendesak untuk dilakukan antara lain dengan perbaikan sistem remunerasi dalam jangka pendek untuk menambah tenaga yang ada.

Adapun tujuan yang ingin diraih melalui strategi ini adalah: (a) Meningkatnya sistem layanan kesehatan dasar yang bermutu dan terjangkau, dan (b) Tersedianya akses infrastruktur Kesehatan dasar hingga ke pelosok wilayah.

Sasaran yang ingin dicapai dari strategi ini adalah:

- 1) Tersedianya standar pelayanan kesehatan
- 2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan tenaga kesehatan
- 3) Tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana kesehatan
- 4) Tersedianya akses infrastruktur kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat

5. Strategi ke-5 (Kelima) : Menyelenggarakan sistem dan kemitraan ekonomi kerakyatan

Strategi kelima adalah upaya untuk mendukung pelaksanaan Misi 5, yaitu “Mengembangkan perekonomian masyarakat melalui pengelolaan pertanian dalam arti luas dengan berorientasi pasar yang didukung dengan kelembagaan, teknologi dan kemudahan permodalan serta informasi yang didukung oleh prasarana penunjang.

Ekonomi kerakyatan berpilar pada ekonomi lokal yang telah ada selama ini yang diselenggarakan oleh masyarakat menengah-bawah, termasuk yang berbasis hasil-hasil pertanian. Keberhasilan Kalimantan Tengah dalam meningkatkan surplus lumbung padinya menjadi salah satu basis pengembangan strategi ini.

Ekonomi kerakyatan juga mengedepankan kemandirian, dalam arti manufaktur hasil-hasil ekonomi hulu juga diupayakan dapat diselenggarakan di Kalimantan Tengah agar nilai tambah produk lebih optimal (PDRB). Untuk itu diperlukan kerja keras berbagai pihak, dari berbagai aspek secara holistik dan benar-benar mendapatkan penekanan pada alokasi anggaran yang memadai dari tahun ke tahun.

Dalam upaya untuk memacu agar ekonomi kerakyatan mendapat porsi yang memadai dalam pembangunan (ekonomi) daerah maka pengembangan kawasan di pedalaman juga harus diprioritaskan. Kajian tentang infrastruktur apa yang harus dipenuhi di masing-masing kawasan dimaksud, mutlak diperlukan. Pemaduan komponen penggerak ekonomi lainnya juga perlu diperhatikan. Lembaga-lembaga keuangan, perdagangan, dan lain-lain, perlu difasilitasi kehadirannya. Pada akhirnya, sebagian komoditas yang dihasilkan dari ekonomi kerakyatan dipetakan untuk dapat diarahkan pada orientasi ekspor.

Adapun tujuan yang ingin diraih melalui strategi ini adalah: (a) Terselenggaranya sistem perekonomian kerakyatan yang terpadu (b) Terselenggaranya kemitraan usaha antara ekonomi kerakyatan dengan ekonomi skala besar.

Sasaran yang ingin dicapai dari strategi ini adalah:

- 1) Tersedianya regulasi dan fasilitasi yang mendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan
- 2) Penguatan kelembagaan ekonomi rakyat
- 3) Meningkatkan kemampuan managerial pelaku ekonomi kerakyatan
- 4) Terciptanya produktifitas pada sektor ekonomi berbasis sumber daya lokal
- 5) Terlaksananya program pembangunan daerah berbasis kemitraan usaha
- 6) Meningkatkan daya saing dan orientasi ekspor komoditas-komoditas lokal

6. Strategi ke-6 (Keenam) : Peningkatan kapasitas aparatur dan standar operasional birokrasi

Strategi keenam adalah upaya untuk mendukung pelaksanaan salah satu tujuan dari misi 5, yaitu “Mengembangkan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah, penguatan kapasitas SDM masyarakat dan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada publik yang lebih baik untuk mewujudkan Good Governance.

Dalam peningkatan kapasitas aparatur dan standar operasional birokrasi, tidak dapat dipungkiri bahwa profesionalitas aparatur dan efektivitas kelembagaan sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pembangunan. Fokus strategi ini adalah pada aparatur. Namun demikian, strategi ini juga menekankan perbaikan tata laksana, akuntabilitas, dan terbebasnya penyelenggaraan pemerintahan daerah dari KKN. Adapun tujuan yang ingin diraih melalui strategi ini adalah: meningkatnya kapasitas dan kinerja aparatur pemerintah.

Sasaran yang ingin dicapai dari strategi ini adalah:

- 1) Peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur secara terencana dan sistematis.

7. Strategi ke-7 (Ketujuh) : Peningkatan daya saing masyarakat

Strategi ketujuh adalah upaya untuk mendukung pelaksanaan misi 5, yaitu “Mengembangkan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah, penguatan kapasitas SDM masyarakat dan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada publik yang

lebih baik untuk mewujudkan Good Governance.”

Suatu pelebagaan merupakan kerangka holistik mendukung capaian misi secara keseluruhan, utamanya keberhasilan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat. Artinya, strategi ini juga menekankan pada aspek pelebagaan terhadap upaya-upaya peningkatan daya saing masyarakat melalui penguatan kapasitas SDM. Suatu pelebagaan mencerminkan perlunya perencanaan yang baik, sistematis dan memiliki sasaran yang sinambung dari waktu ke waktu.

Adapun tujuan yang ingin diraih melalui strategi ini adalah: Meningkatnya daya saing masyarakat.

Sasaran yang ingin dicapai dari strategi ini adalah:

1) Peningkatan ketrampilan masyarakat yang menunjang kegiatan ekonomi.

8. Strategi ke-8 (Kedelapan) : Penguatan seni budaya dan kearifan lokal yang mendukung aktivitas pembangunan

Strategi kedelapan adalah upaya untuk mendukung pelaksanaan misi 6, yaitu “Menciptakan kondisi masyarakat yang aman, dalam kehidupan yang dinamis didalam keberagaman agama, suku, ras dan golongan dengan memberikan pembinaan kehidupan berpolitik dan menegakkan supremasi hukum yang berkeadilan serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

Kondusifitas kehidupan sosial masyarakat merupakan hasil dari proses agenda pembangunan yang terencana di satu sisi. Di sisi lain, terwujudnya kondisi masyarakat yang rukun dan damai menjadi “*enabler*” (penggerak) bagi keberhasilan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Pewujudan masyarakat yang rukun damai, tak sekedar himbuan. Pemerintah daerah akan proaktif memfasilitasi proses dan agenda pembangunan untuk merajut serpihan-serpihan yang terpisah. Mempererat rasa persaudaraan dan menempatkan kembali budaya lokal sebagai salah satu faktor perekat dilakukan dengan semangat HUMA BETANG dan BHINNEKA TUNGGAL IKA.

Adapun tujuan yang ingin diraih melalui strategi ini adalah: terwujudnya soliditas antar kelompok masyarakat.

Sasaran yang ingin dicapai dari strategi ini adalah:

- 1) Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang rukun, damai dan sejahtera di bumi
- 2) Meningkatnya pemahaman dan penghargaan terhadap adat istiadat lokal.

9. Strategi ke-9 (Kesembilan) : Pengelolaan sumberdaya alam yang mendukung

pengembangan ekonomi unggulan daerah

Strategi kesembilan merupakan upaya untuk mendukung pelaksanaan Misi 7, yaitu “Meningkatkan pemberdayaan dalam pengelolaan hutan dan memanfaatkan potensi pertambangan untuk menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan daerah”

Strategi penataan ruang memiliki prioritas penting karena akan menjadi pedoman dalam implementasi program pembangunan dalam pemanfaatan ruang dan program kewilayahan serta menjadi *enabler* agenda pembangunan dari strategi lainnya. Strategi ini mengedepankan pemetaan berbagai potensi pengembangan kawasan sehingga arah pembangunan daerah dapat ditentukan jauh-jauh hari dengan mempertimbangkan sentra-sentra pengembangan wilayah.

Penggalian dan pemanfaatan keunggulan komparatif (*comparative advantage*) merupakan salah satu inti dari strategi ini, baik dari perencanaan dan pengembangannya di masa-masa datang dengan tetap mempertimbangkan upaya untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dalam jangka panjang. Strategi ini juga tetap mengedepankan pengarusutamaan lingkungan hidup sebagai salah satu isu global yang harus diperhatikan. Pemetaan kawasan atau pusat-pusat unggulan ekonomi daerah tetap harus memperhatikan kelestarian lingkungan.

Adapun tujuan yang ingin diraih melalui strategi ini adalah: (a) Revitalisasi dan terciptanya *cluster-cluster* ekonomi unggulan dan (b) Terciptanya rencana tata ruang yang memperhatikan keberlanjutan sumberdaya wilayah.

Sasaran yang ingin dicapai dari strategi ini adalah:

- 1) Teridentifikasinya *cluster-cluster* ekonomi unggulan di kabupaten Barito Selatan;
- 2) Tumbuhnya *cluster-cluster* ekonomi unggulan daerah yang belum berkembang;
- 3) Terwujudnya rencana tata ruang yang selaras dengan arah pengembangan ekonomi unggulan daerah dan berwawasan lingkungan;
- 4) Terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup